

**RENT SEEKING DAN KORUPSI PADA PEMBERIAN IZIN HAK
GUNA USAHA (HGU) PT. PERMATA HIJAU PASAMAN UNIT II
DI NAGARI MALIGI KECAMATAN SASAK RANAH PASISIA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Tesis

***Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas***

Oleh:

M. Afif Wardana

2520831004



Pembimbing:

Dr. Zulfadli, S.Hi, M.Si

Dr. Doni Hendrik, M.Soc.,Sc

PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ABSTRAK

Nama : M. Afif Wardana

Program Studi : Magister Ilmu Politik

Judul : *Rent Seeking* dan Korupsi Pada Pemberian Izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Permata Hijau Pasaman Unit II di Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat

Penelitian ini menganalisis praktik *rent-seeking* dan korupsi pada pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, dengan mengambil kasus PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) Unit II di Nagari Maligi, Kabupaten Pasaman Barat. Meskipun literatur mengenai korupsi agraria di Indonesia cukup banyak, sebagian besar masih berfokus pada dampak pasca-izin atau pelanggaran hukum secara umum. Penelitian ini mengisi kesenjangan (*gap*) teoretis dengan mengeksplorasi bagaimana praktik *rent-seeking* mengintervensi proses awal perizinan melalui negosiasi informal, lobi, dan tekanan politik jauh sebelum keputusan resmi dikeluarkan. Kasus PT. PHP II menjadi lokus studi kasus yang krusial karena membedah anomali tata kelola agraria di tingkat lokal (nagari), di mana institusi tradisional yang seharusnya menjadi pelindung tanah ulayat justru ditarik ke dalam pusaran aliansi predatoris. Studi kualitatif ini menggunakan pisau analisis teori *rent-seeking* dari Michael Ross serta pola relasi kuasa dari Syarif Hidayat. Hasil penelitian menunjukkan adanya manipulasi birokrasi terstruktur melalui manipulasi data spasial yang menyebabkan pencaplokan tanah ulayat dan pengabaian kewajiban pembangunan kebun plasma seluas 1.453 hektar. Praktik perburuan rente ini termanifestasi dalam pola aliansi segitiga (*individual triangle alliances*) antara aktor korporasi, elit adat, dan birokrasi, yang menciptakan situasi di mana institusi formal digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi kepentingan ekonomi perusahaan (sering disebut sebagai *corrupt exchanges* dan *elite capture*). Temuan ini menegaskan bahwa korupsi dalam perizinan HGU bukanlah fenomena reaktif, melainkan desain struktural yang dibangun melalui pemanfaatan diskresi birokrasi yang lemah dan pembiaran (*impunitas*) terhadap penyimpangan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak sekadar menciptakan kerugian negara, tetapi mengakibatkan alienasi struktural dan pemiskinan permanen bagi masyarakat hukum adat di Nagari Maligi.

Kata Kunci: *Rent-seeking*, Hak Guna Usaha (HGU), Korupsi Agraria

ABSTRACT

Name : M. Afif Wardana

Program Study : Magister Ilmu Politik

Title : *Rent Seeking And Corruption In The Issuance Of Business Use Rights (HGU) Permits For PT.Permata Hijau Pasaman Unit II In Nagari Maligi, Sasak Ranah Pasisia District, West Pasaman Regency*

This study analyzes rent-seeking practices and corruption in the granting of Hak Guna Usaha (HGU/Right to Cultivate) permits for oil palm plantations, focusing on the case of PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) Unit II in Nagari Maligi, West Pasaman Regency. Although the literature on agrarian corruption in Indonesia is extensive, most studies still focus on post-permitting impacts or general legal violations. This research addresses the theoretical gap by exploring how rent-seeking practices intervene in the early licensing process through informal negotiations, lobbying, and political pressure long before official decisions are issued. The case of PT. PHP II serves as a crucial locus for a case study because it dissects the anomalies of agrarian governance at the local (nagari) level, where traditional institutions that should protect customary (ulayat) land are instead drawn into a vortex of predatory alliances. This qualitative study employs the rent-seeking theory by Michael Ross and the power-relation patterns framework by Syarif Hidayat. The results indicate the existence of structured bureaucratic manipulation through spatial data manipulation, which led to the seizure of customary land and the abandonment of the obligation to develop a 1,453-hectare smallholder plantation (plasma). This rent-seeking practice is manifested in the pattern of "individual triangle alliances" among corporate actors, customary elites, and the bureaucracy, creating a situation where formal institutions are used as instruments to legitimize corporate economic interests (often referred to as corrupt exchanges and elite capture). These findings confirm that corruption in HGU licensing is not a reactive phenomenon, but rather a structural design built through the exploitation of weak bureaucratic discretion and impunity regarding procedural deviations. This research concludes that such practices not only create state financial losses but also result in structural alienation and the permanent impoverishment of the indigenous community in Nagari Maligi.

Keywords: *Rent-seeking, Hak Guna Usaha (HGU), Agrarian Corruption*